

PUSAT PEMBERITAAN (INFORMATION CENTRE) ANGKATAN BERSENDJATA

INFO UNTUK PARA PENDJABAT²/PETUGAS²;/PERTAHANAN/KEAMANAN, KARYAWAN
ANGKATAN BERSENDJATA DAN MASYARAKAT UMUM JANG BERKEPENTINGAN.

NO. 0524/PEN/SK/DIRDJEN/PPC/1966

DIREKTORAT UMUM/HANKAM

Alamat Redaksi: Medan Merdeka Barat 13 Djakarta

Telp. Redaksi/Tata Usaha: OG 46743

DJAKARTA. DJUM'AT 3 FEBRUARI 1967

PAGI :

INTISARI BERITA

NO:509/TH.II/67.

M U M :

1 - 1	Pangdam V Diaya Majdien Amir Machmud : <u>SITUASI SEKARANG SEDANG MENUDJU SASARANJA</u> hal 1 TERUTAMA DALAM MENDEKATNJA SIDANG UMUM..... hal 1 MPRS KE V..... hal 1	1 1 1
1 - 2	Pengurus P.W.I. Diaya BLACK OUT SELURUH BERITA DARI TOKOH2 DAN..... hal 3 SIMPATISAN ORLA JANG TENGAH MENGHADAPI..... hal 3 SEKARATIL MAUT..... hal 3	3 3 3
1 - 3	Ketua Umum Sekber Golkar Majdien Sokowati : UNTUK MENGATASI SITUASI KONFLIK SEKARANG : hal 8 KITA HARUS WASPADA MENEMPUH KEBIDJAKSANAAN: hal 8 SETEPAT2NJA..... hal 8	8 8 8
1 - 4	Kolonel Suhardiman : MPRS PASTI AKAN MENJATUHKAN VONNIS THD..... hal 9 PRESIDEN SOEKARNO..... hal 9	9 9
1 - 5	Koordinator Kespri Presidium Majdien Alamsjah: MPRS ADALAH MERUPAKAN "TRANSLITION"..... hal 10 DARIPADA HANURA..... hal 10	10 10
1 - 6	Madjelis Ekonomi Indonesia desak DPRGR dan Pemerintah : hal 11 PUTUSKAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN BR TIJINA	11
1 - 7	Menpen B.M. Diah : REVOLUSI HARUS DIPIMPIN KALAU TIDAK AKAN... hal 14 MENIMBULKAN ANARCHI..... hal 14	14 14
1 - 8	Ketua MPRS Diendral Nasution : PERNJATAAN PRESIDEN TENTANG MPRS "DIKEBIRI": hal 17 HANJALAH MERUPAKAN PYSWAR BAGI MPRS..... hal 17	17 17
EKU INBANG :		
2 - 1	PROJEK PERKAJUANDI IRIAN BARAT AKANDIBANGUN hal 1	1
2 - 2	Dr. Mohd. Hatta : SISTIM LAMA JANG BERBAU KOMUNIS TELAH..... hal 2 MENDJADIKAN BEBERAPA PROJEK TERLANTAR..... hal 2	2 2
2 - 3	SEGALA BENTUK PENJELUNDUPAN AKAN DITINDAK..... hal 4 TEGAS..... hal 4 Dan lain lain.	4 4

ANCKATAN BERSERIBATA
INFORMASI CENTRE
LIST PEMBERITA

DIREKTORAT UMUM KAWAN
ALYAN BAHASA: MANDARIN
THE KAWAN (UMUM) 3010

INTERNAL BELIA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....



.....
.....
.....



Pangdam V Djaya Majdjen Amir Machmud:
SITUASI SEKARANG SEDANG MENUDJU SASARANNJA,
TERUTAMA DALAM MENDEKATNJA SIDANG UMUM MPRS
KE - V.

Djakarta, 3 Febr. (PAB)

Pangdam V/Djaya Majdjen TNI Amir Machmud mengatakan bahwa situasi sekarang sudah mentjapai titik kulminasi dan menudju langsung kepada sasarannja serta semakin dekat kepada dilangsungkannja sidang umum MPRS ke V, situasi akan lebih tegang dan bila kita se sama Orba tidak dapat menahan emosi dan melupakan sporegels jang telah ditentukan /disetudjui bersama akan mudah masuk perangkap konsepsi strategi ex PKI.

Hal ini dinjatakan oleh Panglima dalam rangka mental approach untuk mentjapai kesatuan pendapat dan bertindak antara sesama petugas/podjabat pemerintah jang diselenggarakan di Aula Skodam V/Djaya Rabu jbl jang dihidiri oleh Gubernur DCI Djaya Majdjen KKO Ali Sadikin, Laksda (U) Wirindinata dihadapan slagorde pemerintah DCI Djaya dari tingkat tjabat keatas.

Panglima mendjelaskan fakta dan data mengenai gerpol gestapu/PKI, dimana setjara gedokumenteer ter dapat digembong ex PKI jang tertangkap dan dokumen Sitomorang dalam instruksi jang dikeluarkan oleh Gerpol Gestapu/PKI jang ditudjukkan kepada anggota Baperki dan orang Tjina umumnja diberikan petunjuk jang djelas untuk mendjegal perdjoangan Orba disegala bidang. Oleh karena itu Panglima menekankan agar kita djangan masuk perangkap rasialisme, sebab bila mana terdjadi bentrokan rasial setjara tidak sadar kita ikut melaksanakan konsepsi strategi gerpol Gestapu/PKI.

Hantjurkan pembina gelap PKI.

Berbitjara mengenai operasi kalong jang pada puntjak klimax dapat menangkap Supardjo, dan Anwar Sanusi, kepada Corps Pamongpradja Pak Amir mengharapakan perhatian khusus agar kita sama2 mawas diri dan meningkatkan kewaspadaan, untuk menghantjurkan pembina gelap PKI jang menanamkan Celcel groupnja, dimana djuga ada group PKI jang telah menjelinap ditubuh pemerintah sipil.

Dikatakan djuga bahwa Pamongpradja dapat memegang peranan penting untuk menghantjurkan group tsb dengan kerdjasama dengan instansi lain. Berikanlah penerangan kepada rakjat setjara djudjur dan wadjar dan tingkatkanlah rakjat akan Pantja kesadaran sosial (ke sadaran bernegara, berpemerintah, berkembangansaan, berangkatan sendjata dan kesadaran sosial). Achirnja Panglima memberikan petunjuk jang djelas untuk mendjadi pengan dalam menghadapi perdjoangan menenangkan Orba.

Adanja.....

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



3 - 2 - 1 67

U M U M :

Adanya pengertian antara pihak militer dan pemerintah sipil, dualisme hilang.

Dalam kesempatan ini Gubernur DCI Djaya Majdjen KKO Ali Sadikin dalam sambutannya mendjelaskan bahwa Djakarta Raya ini hanya ada satu polisy bersama atas dasar musjawarah dan mufakat antara KoGAB Pepelrada dan Pantjatunggal. Dengan adanya pengertian antara pihak militer dan pemerintah sipil, menurut Pak Ali Sadikin hilanglah dualisme, sehingga masing2 mempunjai sasaran dantanggung djawab jang djelas.

Pak Ali Sadikin menekankan agar kita menghi langkan ambisi pribadi maupun golongan dan kepentingan nasional harus didahulukan. Kepada para pedjabat pamongpradja, Pak Ali mengadjak agar berusaha mentjip takan situasi dan kondisi untuk mensukseskan pelaksanaan Dwi Dharm dan Tjatur Karya Kabinet Ampera. Karena daerah mempunjai andil besar untuk mentjiptakan iklim tsb dan djustru dipihak lain gerpol Gestapu/PKI berusaha terus untuk menggagalkan usaha Kabinet Ampera. Demikian Pendam V/Djaya.

(AB/ 037/II/67)

---(w)---

SUMBANGAN UNTUK MESDJID "KATAMSO"
DI JOGJAKARTA RP. 10.000 . - .

Djakarta, 3 Febr. (PAB)

Pengurus Jajasan Dana Sosial dan Jajasan Harta Sosial dalam rapatnja baru2 ini telah memutus kan untuk memberikan bantuan kepada mesdjid Mung gung di Solo sebesar Rp. 1.000,- mesdjid Katamso di Jogjakarta sebesar Rp. 10.000,- untuk Kongres ke III Pergerakan Mahasiswa Indonesia di Djakarta sebesar Rp. 1000,- Musjawarah kerdja Front Pemuda DCI Djaya sebesar Rp. 1000,- dan kepada Balai Penelitian dan penindjauan di Jogjakarta sebesar Rp. 5.000,-

(AB/06/II/67)

----(w)----





U M U M :

3 - 2 - 1 67

Pengurus P.W.I. Djaya :

BLACK-OUT SELURUH BERITA DARI TOKOH-2
DAN SIMPATISAN ORDE LAMA JANG TENGAH
MENGHADAPI SEKARATIL M.UT.

Djakarta, 3 Februari (PAB)

Wartawan Indonesia, sebagai salah satu bagian dari kekuatan Rakjat Indonesia, dalam setiap perdjongan Nusa dan bangsa tidak boleh ketinggalah dalam i kut serta bersama2 dengan rakjat seluruhnja, demikian dinjatakan oleh Wakil Ketua P.W.I. Djaya Jousli Sjah.

Selandjutnja bahwa konperensi kerdja Persatuan Wartawan Indonesia seluruh Indonesia di Pasir Putih Djatim bulan Oktober tahun jl. telah dengan tegas menempatkan diri, P.W.I. dalam barisan Orde baru.

Sekarang, Persatuan Wartawan Indonesia (P.W.I.), menjadari dengan sedalamnja, bahwa perdjongan Orde baru dalam menumbangkan Orde lama sudah hampir sampai pada jang ditudju. Namun demikian perdjongan Tuntutan Hati nurani rakjat ini tidak boleh kendor sedikit djaupun. Malah harus ditingkatkan terus untuk memenangkan keadilan dan kebenaran jang dihadjatkan oleh orang banjak.

Oleh karen itu Pengurus P.W.I. Tjabang Djakarta menjerukan kepada seluruh anggotanja supaja terus menerus dengan aktif memberikan prioritas Utama kepada pemberitaan2 jang bersifat perdjongan Orde baru melawan Orde Lama.

Kepada seluruh Wartawan Indonesia di Ibukota jang mendjadi anggota P.W.I. Djaya diseluruh agar memblak out seluruh berita dari tokoh2 dan simpatisan /antek2 Orde lama jang tengah sekaratil maut sekarang ini. Semoga Tuhan JME memberikan kita Petundjuk dan PelindunganWA! Demikian Pengurus P.W.I. Djaya.
(AB/045/II/67).

---(w)---

HALAL BIHALAL PWI TGL. 5 FEBRUARI
1967 JANG AKAN DATANG

Djakarta, 3 Februari (PAB)

Atas Kerdjasama PWI Djaya - PWI Pusat dan SPS OPS Pers Pusat pada tgl. 5 Febr. '67 jad bertempat di Hotel Duta Indonesia, Djl. Gadjah Mada Djakarta akan mengadakan suntu pertemuan silaturachmi/halal bihalal. Pertemuan tsb selain akan dihadiri oleh para anggota PWI Djaya akan pulá dihadiri oleh para penerbit anggota SPS-OPS-Pers Pusat, serta para Wartawan Asing jang berada di Ibukota Djakarta dan para atase pers serta para Menutama dan Menteri Kabinet Ampera. Akan turut serta memeriahkan pertemuan tsb para artis dan penjanji ternama serta band tenar di Ibukota. Demikian didjelaskan oleh Panitia.
(AB/049/II/67)

---(w)---

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



U M U M :

KAMI DAN KAPPI RIAU LULUSKAN KEGIATANNYA

Pekanbaru, 3 Feb. (PAB)

Baru2 ini KAPPI Daerah Riau dan KAMI Komisa-
riat UNRI Pekanbaru, telah kembali dari daerah Kepu-
lauan Riau dalam mengadakan penindjauan kedaerah tdb.
Dalam suatu wawantjara khusus dengan Wartawan PAB, Su-
jono Ketua Presidium KAPPI Riau jang didampingi oleh
Rusdi Hanif dari KAMI Komisariat UNRI Pekanbaru me-
njatakan, bahwa penindjauan kedaerah seperti jang
telah dilakukan itu, dimaksudkan untuk setjara lebih
djelas memahami masalah2 dan kesukaran2 jang dihada-
pi masyarakat, terutama didaerah2 jang "djauh" terpen-
tjil seperti di Kepulauan Riau. Dan dengan begitu, akan
dapat dilaksanakan kegiatan2 jang bersifat sosial con-
trol, sosial participation dan sosial responsibility
setjara objektif dan bermanfaat.

Misi jang bersifat periodik

Dalam keterangannya dikatakan, bahwa misi tsb
direntjanakan bersifat periodik. Apalagi dalam pembi-
naan Orba sekarang ini, suasana peralihan ini harus di-
usahakan setjara tnja sampai ke pelosok2, karena dengan
demikian akan diketahui dan dipahami kesulitan2 jang di-
hadapi oleh masyarakat, sampai akhirnya diusahakan per-
baikan dan penjalurannya setjara wajar, demikian misi
tsb. (AB/039/II/67)

---(w)---

IPKI WILAJAH RIAU AKAN BERMUSJAWARAH

Pekanbaru, 3 Feb. (PAB)

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Dwi Dhar-
ma dan Tjatur karya Kabinet Ampera dan memperkokoh
struktur dan konsolidasi partai IPKI sebagai aparatus
revolusi Pantjasila, di Pekanbaru akhir bulan Februa-
ri 1967 mendatang, direntjanakan akan diadakan Musja-
warah wilajah ke II Partai IPKI daerah Riau.

Untuk keperluan tsb, baru2 ini telah dibentuk
suatu panitia Musjawarah, jang akan melaksanakan Mu-
sjwarah tsb, dengan ketua Ismed Harunjah dan Sekre-
taris A. Rahman BA. Bendahara Nuraini, sedangkan pena-
sehat ditundjuk Edward Napitupulu, Ketua Umum DPD IPKI
wilajah Riau jang sekarang.

(AB/039/II/67)

- 17 -

---(w)---





U M U M :

3 - 2 - 1 67

39 ORANG PEGAWAI SIPIL AKRI DIBERI
STATUS AKTIF A.K.R.I.

Pekanbaru, 3 Feb. (PAB)

Dalam suatu upatjara baru2 ini , telah dilakukannya pengambilan sumpah dan pelantikan 39 orang pegawai Sipil AKRI Skomdak IV Riau, yang diasimilasikan kedalam status aktif AKRI.

Pada upatjara yang dihadiri oleh seluruh perwira , bintang dan tamtama Skomdak IV Riau, Pangdak IV Riau Drs. Chaeruddin Nitikusumah menjatakan bahwa garis djuang AKRI yang berlandaskan Pantjasila dan diperkuat dengan Sapta Marga dan Tjatur Prasetya dan Tribrata, adalah merupakan pegangan mutlak dalam mempersiapkan diri baik setjara fisik maupun mental terhadap rongrongan yang dilakukan oleh golongan manapun terhadap Sang Merah Putih dan Pantjasila.

Dikatakan bahwa setiap amal bakti kita, harus didasari oleh sumpah djabatannya, sumpah Tuhan dan sumpah terhadap diri sendiri, sehingga tugas2 apapun selanjutnya yang akan dilakukan tidak terlepas dari djalannya yang diridhoi Tuhan Subhanahuwataalah, demikian Pangdak IV Riau.

(AB/039/II/67)

---(w)---

" TRI ATJARA " UNIVERSITAS INDONESIA

Djakarta, 3 Feb. (PAB)

Pada hari Sabtu , tgl. 4 Februari 1967, bertempat di Salemba no. 4 Djakarta, akan diselenggarakan "Tri Atjara" Universitas Indonesia, yaitu pertama - Penutupan Mapram 1967 dan penerimaan resmi mahasiswa Baru , kedua Hari Sardjana ke VII - dan ketiga Dies Natalis ke XVII, dimana akan diresmikan penerimaan lebih kurang 2700 orang mahasiswa baru dan penyerahan lebih kurang 500 orang sardjana baru kepada masyarakat.

Pada upatjara tersebut diharapkan akan berbijaksana ketua Presidium Kabinet Ampera.

Demikian diumumkan Biro Humas Universitas Indonesia.

(AB/045/II/67)

---(w)---





U M U M :

3 -1- ' 67

DPD DEPERBU PNI/FM BUBARKAN DIRI

+ Lagi2 P.N.I./Fm.mreteli

Padang, 3 Febr. (PAB)

Dewan Pimpinan Daerah Deperbu/Buruh Marhaenis Sumbar, dalam suatu pernjataannya baru2 ini, telah menjatakan membubarkan diri dan seluruh anggotanya menjatakan keluar dantidak terikat lagi dengan organisasi itu. Dalam pernjataan jang disampaikan kepada DPD PNI Sumbar, Pepelrada Sumbar dan DPP KB Deperbu/BM di Djakarta djuga dinjatakan bahwa segala harta kekayaan Organisasi tsb berupa bundel2 dan stempel Organisasi diserahkan kepada Dep.Tenaga Kerdja Sumbar di Padang.

Dengan membubarkan dirinja DPD KB Deperbu/BM ini, di Sumbar telah terdjadi banjak sekali pembubaran diri dari mntel2 Organisasi jang bernaung dibawah pandji2 PNI /FM. Dimana seperti tlh dikabarkan sebelumnya, pembubaran diri itu telah berlangsung di Padangpanjang dan lain2nja, demikian wartawan PAB dari Padang melaporkan . (AB/039/II/67)

---(w)---

JON 619 BRIGMOB GANTI PIMPINAN

Pekanbaru, 3 Febr. (PAB)

Dalam suatu upatjara resepsi baru2 ini, telah berlangsung serah terima djabatan Komandan Bataljon 619 Brigmob Pekanbaru, dari Kopol Heru Pranoto kepada AKP Rumin Ahmad.

Pangdak IV Riau, KBP Drs. Chaeruddin Nitikumah jang hadir pada malam tsb, dalam kata sambutanja a.l. menjatakan bahwa kita sebagai manusia harus mawas diri. Karena jang pertama tama harus mengetahui diri kita sendiri bukanlah orang lain;.

Mengena pernjataan "Desember ABRI", oleh Pangdak dikatakan, bahwa kita harus mengamankan dan mengahatkan arti Sang Saka Merah Putih, agardjangan ditambahi warna oleh orang2 lain, begitupun Pantjasila harus kita pelihara, agar tidak ada orang jang berani menambahi kalimat2nja, demikian KBP Drs. Chaeruddin Nitikumah.

Dapat ditambahkan bahwa Kopol Heru Pranoto telah dipindahkan untuk mendjabat Kepala Staf Resimen 6 Brigmob di Padang, sedangkan AKP Rumin Ahmad sebelum mendjabat Dan Jon 619 ini, bertugas di Djakarta.

(AB/039/II/67).

---(w)---



U M U M :

3 - 2 - 67

RI BURUDJULAZAD DIPERKEMILKAN KEPADA
PEDJABAT2 MENADO

Djakarta, 3 Febr. (PAB)

Kapal RI Burudjulazad jang membawa team Operasi Baruna dua tanggal 24 Djan. 1967 tiba dipelabuhan Bitung Manado setelahsinggah di Temate Maluku Utara untuk keperluan supply air dan bahan2 makanan . Pangdamar X Briedjen Kko Sujatno jg menerima kedatangan kapal tsb digedung Staf Kodamar X, dalam sambutan nja dihadapan para Ketua Team baruna dua memperingatkan tentang situasi negara dewasa ini jang nampaknja namun kewaspadaan harus tetap dimilikii agar djangan sampai terperosok kedalam hal2 jang tak diinginkan demi untuk mendjamin ketenangan dan keamanan keseluruhannja.

Selanjutnja Pangdamar X Brigdjen Kko Sujatno dengan didampingi oleh Pangdam XIII Merdeka Brigdjen Sudarmono , Pantjatunggal serta para Wartawan Manado hari Kamis tgl. 26 Djan. 1967 berkenan mengadakan kunjungan dan peninjauan kokapal Hidrografi ALRI RI Burudjulazad.

Rombongan diterima dengan ramah tamah oleh Dan RI Burudjuluzad Major Laut Katopo jang didampingi oleh Perwira I RI Burudjulazad Maj.Laut Lumanau serta para ketua team research.

Kepada Pangdamar X dan pembesar2 pemerintahan setempat dilaporkan oleh team2 research tsb pengalaman2, kegiatan dan tugas2 selama berada di Indonesia bagian timur , dan selama singgah di Bitung telah pula diturunkan alat2 obserfasi tjuatja untuk keperluan dinas djawatan pterologi di Manado. Demikian berita Puspen AL.

(AB/04/II/67)

---(w)---

2 KOLONEL SEBAGAI PERWIRA SENIOR
KOHANMARNAS

Djakarta, 3 Febr. (PAB)

Deputy Panglima KOHANMARNAS Laksda (L)OB. Sjaaf Kamis pagi diruang kerdja MB KOHANMARNAS telah meresmikan kenikinan pangkat dua orang Letnan Kolonel menjadi Kolonel masing2 ialah Kol.Laut Atung Sudibjo Kepala Staf KOHANMARNAS dan Kol.Laut Suwadji Stjonegoro Ketua Gabungan VI.

Kepada kedua Kol.jang merupakan perwira2 Senior di KOHANMARNAS dengan disaksikan oleh ketua2 Gabungan KOHANMARNAS lainnja, PANGLIMA menandakan bahwa kemikan pangkat tsb adalah untuk kobentingan serta perkembangan KOHANMARNAS. Dengan kobadiran kedua perwira senior di KOHANMARNAS maka terwujudlah kemajuan KOHANMARNAS. Selanjutnja Laksda Laut OB. Sjaaf menekan agar kemikan pangkat dapat mempertinggi kemampuan KOHANMARNAS untuk menyelesaikan pekerjaan2 dalam segala persoalan. (AB/04/II/67)

---(w)---

ST

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]



U M U M :

8 -

3 2 67

Ketua Umum Sekber Golkar Majdjen

Sokowati :

UNTUK MENGATASI SITUASI KONFLIK SEKARANG KITA

MURUS WASPADA MENEMPUH KEBIDJAKSANAAN SE

TEPAT2NJA

Djakarta, 3 Febr. (PAB)

Ketua Umum Pusat Sekber Golkar Majdjen S. Sokowati memandaskan bahwa dalam mengatasi situasi konflik sekarang ini kita harus waspada menempuh kebijaksanaan-jang setepat2nja demi tertjapainja kemerangan Orba dimana proses dinamikanja kekuatan masyarakat jang sedang berkembang dengan pesatnja sekarang ini dalam rangka mentjapai kematangannja harus kita manfaatkan sedemikian rupa sehingga kemenangan jang kita tjapai itu mempunjai landasan sedjarah kegemilangan jang didjiwai oleh mluri kebesaran bangsa sebagai mana telah diwariskan oleh nenek mojang kita.

Hal ini dikemukakan oleh beliau dalam kata sambutannya pada malam halal bihalal Sekber Golkar bertempat di Puri Eka Warna Kabjoran Selasa malam jl jg selandjutnja menambahkan bahwa hendaknja kita djangan meninggalkan sedjarah kepemimpinan bangsa jang kurang baik bagi kepentingan masa depan anak tjutju kita. Sesuai dengan dasar kepribadian bangsa sendiri, menurut Djend. Sokowati, maka bagi kita kiranja berlaku suatu pedoman jang berbunyi "Menang tan ngasoraken mengalah" jang artinja ialah bahwa kita harus berdjombang untuk mentjapai kemenangan dengantidak usah musuh merasakalah, sebagai salah satu falsafah kepemimpinan jang diwariskan oleh nenek mojang kita dan jang pasti tidak menjimpang dari djiwa Pantjasila.

Tegakkan "buah budi" jang luhur
dengan semangat "Tjinta dan Kasih".

Selandjutnja Majdjen Sokowati mengadik pula untuk merenungkan sedjenak bagi masa depan rakyat dan bangsa Indonesia dimana dalam kantjahnja pergolakan jang semakin gawat dewasa ini kita sebagai umat manusia maupun sebagai warga darisesuatu bangsa berkewadajiban untuk berusaha menjalamatkan keadaan dan bangsa ini dari segala tantangan perpertjahan dan kehantjuran. Untuk itu kita harus berpegang teguh pada suatu prinsip kekuatan didalam semangat nja Orba guna menundjangan dan menegakkan Orba ini dan hendaknja kita masing2/pula "Buah Bidi" jang luhur sebagaimana adjaran jang bersumberkan kepada azaskeTUHANAN JME ialah menjebarkan semangat "Tjinta dan Kasih" diantara sesama umat manusia. Demikian Ketua Umum Sekber Golkar Majdjen S. Sokowati. Dlm rangka gerakan Demokrasi Pantjasila maka azas keadilan dan kebenaran adalah mendjadi tiang penegak bagi kehidupan masyarakat gotong rojong kita jg menyang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan oleh karena itu menegakkan dasar keadilan dan kebenaran adalah berarti mendjamin pertumbuhan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi maupun demokrasi kebudayaan setjara wadjar. /menegakkan

(AB/05/II/67)

PERP... (w) ...IONAL

REPUBLIK INDONESIA



3 - 2 - 1 67

U M U M :

Kolonel Suhardiman :
MPRS PASTI AKAN MENDJATUH KAN VONNIS THD
PRESIDEN SOEKARNO

Djakarta, 3 Febr. (PAB)

Kupenas Soksi Kolonel Drs. Suhardiman dalam memberikan petunjuk dan pesan kepada wakil2 Soksi jang baru sadja dilantik sebagai anggota DPRGR menandakan, bahwa tugas pokok jang harus diperdjoangkan dan dimenangkan dalam waktu dekat ialah diachirnja dulisme dalam pemerintahan dan pimpinan negara sekarang ini.

Dalam memberikan tanggapan atas situasi gawat achir2 ini Kolonel Suhardiman menjatakan bahwa hanya satu alternatif dalam persoalan Presiden Soekarno, jaitu Bung Karno harus mengundurkan diri dan menjerahkan kekuasaan kepada SUPERSEMAR /Pengemban Ketetapan MPRS No. IX.

Tugas2berat jang kita hadapi

Sementara itu dikemukakan djuga, bahwa tugas2 jang dihadapi oleh para anggota DPR GR chususnja dan slagorde Pantjasila umumnja adalah berat. Disamping DPR GR harus dapat segera menentukan sikap tegas terhadap kedudukan Presiden Sukarno, persoalan2 lain separti UU Keptaraan, Ke Ormasan dan Golkar, djuga Undang2 pemilu haruslah dapat dimenangkan sesuai dengan garis2 perdjongan jang mendjadi tuntutan Orde Pantjasila.

Disamping hal tsb demikian Kolonel Suhardiman kita harus dapat mengamankan dan men-sukseskan sidang umum ke V MPRS jang akandatang. Dan terserah kepada MPRS apakah Lembaga Tertinggi ini dapat mengamabil keputusan2 sesuai dengan tuntutan Hanura atau tidak, hal ini akan djuga sangat tergantung dari kekompakkan dankemampuan seluruh slagorde Pantjasila itu sendiri. Tetapi kita yakin, demikian ditandakan lebih lanjut, bahwa MPRS nanti pasti akan menjatuhkan vonnis terhadap kedudukan Bung Karno sebagai Presiden.

Demikian a.l. Kolonel Suhardiman.

(AB/049/II/67).

----(w)-----



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

John
Don
Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



3 - 2 - 1967

U M U M :

Koordinator Kespri Presidium Majdjen
Alamsjah :
MPRS ADALAH MERUPAKAN "TRANSLATION" DARIPADA
HANURA

Djakarta, 3 Februari (PAB)

Koordinator Kespri Presidium Kabinet Ass.VII Men/Pangad Majdjen Alamsjah dalam briefingnya dihadapan Pamen/Pati Staf Hankam bertempat di Aula Hankam Kamis pagi a.l. menyatakan bahwa MPRS adalah "translation" daripada Hanura dimana sesudah pemilu yang akan datang nanti harus menghasilkan MPR yang tetap berlandaskan dua hal pokok yakni : Pantjasila dan UUD '45 dimana dari MPR ini dihasilkan pula pemerintahan dan DPR yang baru.

Selanjutnya Majdjen Alamsjah menambahkan bahwa dengan adanya usaha dari golongan yang tertentu dimasa yang lalu untuk menarik revolusi kekiri dankekanan tetap merugikan negara dan bangsa baik di bidang politik, sosial dan ekonomi dimana untuk ini harus terus menerus diusahakan pengamanan terhadap Pantjasila.

Disamping pemberantasan Gestapu/PKI sampai ke akar2nya yang tidak memungkinkan mereka untuk timbul kembali serta melanjutkan perdoangan terhadap imperialisme mengingat masih tetap adanya bahaya atau antjaman2 musuh dari luar seperti misalnya djuga ke giatan2 antek2 Gestapu/PKI diluar negeri.

Untuk sukseskan Kabinet Ampera tak ada tawar menawar.

Sementara itu Majdjen Alamsjah mengatakan pula bahwa sebagai spontanitas daripada adanya Gestapu/PKI maka timbul atau lahirlah kekuatan2 yang bebas dalam masyarakat yang menjadi pendukung Orba bahkan turut mensukseskan telaksana-nya Orba tapi yang apa bila tidak dibimbing dapat merumuskan tenaga yang malah bertentangan atau dapat menimbulkan ekses yang melawan.

Djadi tidak ada tawar menawar lagi bahwa untuk mensukseskan Kabinet Ampera sekarang ini landasan i diilnja harus Pantjasila, landasan struktural adalah UUD 45 dan landasan operasional keputusan sidang IV MPRS dimana untuk melaksanakan ini semua kita harus mempunyai aparatur yang kuat dan sehat disamping dalam organisasi2 dibidang sosial yang harus berdjawa Orba.

Demikian a.l. Majdjen Alamsjah dalam briefingnya setelah mendjelaskan dengan pandjang lebar sebelum mengenai strategi Dasar hukum dalam rangka stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi yang men djafi "mission" ABRI sesuai dengan ketetapan MPRS No. 13 ". (AB/05/II/67).

----)w)---



U M U M :

3 - 2 - ' 67

SELESAIKAN PERSOALAN PRESIDEN SUKARNO
LEWAT SALURAN HUKUM

Djakarta, 3 Febr. (PAB)

Badan Pekerdja Harian Pusat Madjelis Ekonomi Indonesia dalam pernjataan kepada pers jang ditanda tangani oleh Ketua Umumnja R.L.Tobing SH dan Sekdjennja W.Kusumanegara menjatakan bahwa dalam menanggapi konflik sekarang ini dan demi togaknja hukum, keadilan dan kebenaran mendukung tuntutan penyelesaian persoalan Presiden Sukarno lewat saluran hukum sebagaimana mesti njaja. Kepada seluruh anegota dan pendukung2 Madjelis Ekonomi Indonesia dan segenap golongan ekonomi nasional pada umumnja, diserukan untuk ikut setjara aktif dalam perdjoangan memenangkan Orba untuk menegakkan hukum keadilan dan kebenaran itu bersama2 dengan seluruh lapisan masjarakat pendukung2 Orba bainnja.

(AB/04/II/67).

----(w)----

Madjelis Ekonomi Indonesia desak DPRGR
dan Pemerintah :
PUTUSKAN HUBUNGAN DIPLOMATIK DENGAN RR TJINA

Djakarta, 3 Febr. (PAB)

Badan Pekerdja Harian Pusat Madjelis Ekonomi Indonesia dlm pernjataannja kepada pers jang ditanda tangani olehketua umumnja R.L Tobing SH dan Sekdjennja W.Kusumanegara menjatakan bahwa kegontjangan politik danketiadanja stabilitas pemerintahan jang berlabut2 hingga sekarang ini, tidak terlepas dari tjampur tangan RRT ditanah air kita jang bekerdja sama dengan sementara orang2 Indonesia jang mendjadi kawan2 seperdjoangan seporosnja.

Madjelis Ekonomi Indonesia berpendapat bahwa pemerintah bersama rakjat bema2 sudah harus mengambil langkah2 jang positif untuk memelihara keamanan dalam negeri dan kita dan menjaga martabat serta kewibawaan pemerintah dan negara kita dimta dunia. Oleh karena itu Madjelis Ekonomi Indonesia mendesak dengan penuh keungguhan kepada pemerintah dan DPR GR agar memutuskan hubungan dengan RRT dalam tempo jang sesingkatnja.

Tentang pertahanan Bersama
Negara2 Asia Tenggara.

Mengingat sifat2 agresif dari RRT terbukti dengan tjampur tangan nja dalam urusan2 intern negara2 lain, chusunnja dinegara2 Asia Tenggara maka Indonesia perlu mengambil langkah2 jang kongkreet untuk kepentingan nasional kita dan kepentingan2 negara Asia Tenggara pada umumnja dengan berusaha disamping mewujudkan suatu sistim pertahanan bersama militer antara negara2 Asia Tenggara djuga mewujudkan kerdjasama ekonomi. Dalam hubungan kerdjasama ekonomi antara negara2 Asia Tenggara tsb, Madjelis Ekonomi Indonesia berhasrat untuk menjelenggarakan suatu konperensi Ekonomi negara2 ASIA TENGGARA dalam tahun ini.

(AB/04/II/67).

---(w)---



U M U M :

3 - 2 - ' 67

MADJELIS EKONOMI INDONESIA MENUNTUT
SUPAJI PRESIDEN SUKARNO DINON AKTIFKAN DARI
SEGALA DJABATANNJA

Djakarta, 3 Febr. (PAB)

Badan Pekerdja Harian Pusat Madjelis Ekonomi Indonesia dalam pernyataan kepada pers jang ditanda tangani oleh ketua umum nja R.L. Tobing SH dan Sekdjen nja W. Kusumanegara menjatakan bahwa sambil menunggu keputusan MPRS jad pimpinan Tertinggi Eksutif ketua Presidium Kabinet/Pemegang SP 11 Maret 1965 jang kedu dukannja telah diperkuat dengan ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966 segera mengambil tindakan penjelematan /pengamnan nusa dan bangsa dengan sementara menon aktifkan Presiden Sukarno derisegala djabatannja kenegaraan.

Tindakan penjelematan dan pengamnan NUSA dan BANGSA jang dilakukan bersama2 dengan ketua MPRS dan Ketua DPR GR segera dilaksanakan untuk kemudian disusul dengan mentrapkan ketetapan MPRS No.XV /MPRS/66.

(AB/04/II/67)

-1--(w)----

IBU SUTJIPTO JUDO BERHALAL BIHALAL

Djakarta, 3 Febr. (PAB)

Bertempat di wisma Bhayangkara dj. Sendjaja Kobajoran baru djum'at pagi ini Ibu Sutjipto Judodihardjo akan menjolenggarakan halal bihalal bersama Ibu2 Bhayangkari serta pegawai sipil wanita DEPAK

Peringatan halal bihalal tsb diadakan dalam rangka mempererat hubungan kekeluargaan antara ibu

Men/Pangak dengan ibu2 Bhayangkari dan pegawai Sipil Wanita DEPAK, serta diharapkan akan dihadiri oleh segenap ibu2 pedjabat AKRI dan pegawai sipil wanita DEPAK. Demikian diterangkan oleh perwira PUSPENAK.

(AB/013/II/67).

---(w)---

PERTJETAKAN BATANG HARI DIKEMBALIKAN

Djakarta, 3 Febr. (PAB)

Menurut kalangan BPU Pertjetakan, bahwa pada hari Sabtu tgl. 4 Febr. jad djam 09.00 pagi akandiadakan upatjara serah terima pertjetakan Batanghari di Dj. Kemakmuran 31 jang telah 4 tahun lebih diambil alih oleh pemerintah pra Gestapu. Perlu dikatakan Pertjetakan Batanghari ini adalah jang teachur ketika diambil oleh PNdj pada 4 th jl itu sekarang merupakan pertjetakan Swasta jang pertama di Ibukota jang diserahkan kembali kepada pemiliknja.

(AB/017/II/67)

---(w)---



3 - 2 - '67

U M U M :

MASALAH TUNA KARYA AKAN SEGERA DI-
TANGGULANGI

Djakarta, 3 Febr. (PAB)

Lembaga Sosial Dharma Kasih dibentuk atas sponsor Dep. Sosial yang berkedudukan di Djakarta, dan tujuan dari lembaga tsb bersama2 dengan badan sosial lainnja membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah Tunakarya diIndonesia.

Dan berusaha mengumpulkan dana2 yang berben- tuk uangmaupun barang dari dalam maupun dari luar ne- geri. Sebagai tahap pertama lembaga sosial Dharma Kasih yang panitya persiapannya diketuai oleh Dirdjen Bina karya Letkol Amadi akan segera ditanggulangi masalah tunakarya dengan membrikanbimbingan mental/rohani di samping bantuan2 materil danpendidikan kedjuruan seba- gai landasan hidup mereka ditengah2 masjarakat sebagai warganegara yang berguna.

(AB/040/II/67)

----(w)----

SEKITAR DIBONGKARNJA TREM KOTA

Djakarta, 3 Febr. (PAB)

Dalam masalah menanggulangi kesulitan angku- tan di ibukota adalah satu hal yang kiranya sekarang ini merupakan tanda tanda, bahwa beberapa tahun yang lalu dibongkarnya "Trem Kota", yang menurut ketera- ngan "Trem" tersebut diperuntukan /untuk dimanfaat- kandikota Surabaya /Djatim tetapi kenyataan dikota tsb pun tidak pernah menerimanya hingga saat sekarang ini.

Gubernur KKDCI tidak pernah menerima laporan dan dari sebarang keterangan yang diperoleh menjelas- kan bahwa Trem tersebut dijadikan besi tua yang kemu- dian didjual dikiloan(?) kemana semuanya ini terbang melajang.

(AB/040/II/67)

----(w)----



1952
No. 1000
KEMENTERIAN PERKULIAHAN
REPUBLIC OF INDONESIA
No. 1000
KEMENTERIAN PERKULIAHAN
REPUBLIC OF INDONESIA

1952
No. 1000
KEMENTERIAN PERKULIAHAN
REPUBLIC OF INDONESIA
No. 1000
KEMENTERIAN PERKULIAHAN
REPUBLIC OF INDONESIA



U M U M :

3-2 - ' 67

Menpen B.M. Diah :

REVOLUSI HARUS DIPIMPIN, KALAU TIDAK,
AKAN MENIMBULKAN ANARCHI

Djakarta, 3 Februari (PAB)

Menteri Penerangan BM Diah dalam briefingnja dihadapan para penanggung djawab/Pimpinan Redaksi surat kabar diibukota menegaskan bahwa, hendaknja mass media dapat membantu pemerintah meratakkan djalan dalam usaha merhabilitasi, dan stabilitasi serta konsolidasi dalam negara kita. Karena itu, dalam memetjahkan situasi politik dualisme sekarang ini harus kita djalankan setjara konstitusionil.

Hal inidinjatakan oleh BM Diah Kamis pagi ke marini dalam memberikan briefingnja dihadapan pemimpin2 Redaksi /Penanggung Djawab harian2 /mingguan/madjalah dan kantor2 berita diibukota bertempat dikantor Deppen Djl. Kebonsirih Djakarta.

Dalam briefingnja itu Menpen BM Diah menekankan bahwa Revolusi harus dipimpin, karena kalau tidak demikian akan menimbulkan situasi anarchi. Namun demikian, kita tidak mentjegah kekuatan2 revolusioner massa jang melakukan demonstrasi jang dewasa ini dilanjarkan, karena hal itu djuga termasuk dalam hak demokrasi. Pemerintah mengakui dan mengetahui kehendak rakyat, karena itu pemerintah memahami kehendak rakyat tsb.

Sekitar pemilihan umum.

Berbitjara tentang pemilu 1968 jad Menpen BM Diah, menegaskan bahwa, pemerintah tetap berhasrat ingin melaksanakan pemilu jad, karena itu kini pemerintah tengah mempersiapkan rantjangan Undang2 Pemilu jang akan disampaikan pada DPR GR.

Sementara itu Menpen menegaskan pula bahwa, hendaknja pemilu ini dapat dimenangkan oleh kekuatan Orba, oleh karena dalam Pemilu itu nanti harus benar2 sukses dengan dimenangkan oleh Orba tersebut.

Selandjutnja Men/Pen BM Diah mengatakan bahwa dalam rangka menghadapi situasi sekarang ini, mass media benar2 dapat melaksanakan kerdjasama jang baik dengan pemerintah, terutama dalam rangka mensukseskan Pemilu jad.

Demikian al. keterangan menpen BM Diah dalam briefingnja dengan para pimpinan Redaksi /Penanggung Djawab sk2 diibukota.

(AB/045/07/67/II)

----- (w) -----





U M U M :

PERNJATAAN BERSAMA ANGKATAN 45
LEGVETRI DAN PEPABRI DAERAH JOGJAKARTA

Jogjakarta, 3 Febr. (.PAB)

Angkatan 45 ,Legiun Veteran Markas Daerah dan Persatuan Purnawirawan ABRI Daerah Istimewa Jogjakarta pada tgl.28 Djan.1967 telah mengeluarkan pernyataan ber sama jang isi lengkapnja adalah sbb:

Dengan mohon rachmat dan ridhlo TUHAN JME,kami:
1. Angkatan 45 daerah Istimewa Jogjakarta, 2. Legiun Ve teran Pedjông kemerdekaan RI Markas daerah Istimewa Jog jakarta, 3. Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) daerah Jogjakarta berdasarkan :

a. demi membina persatuan dan kesatuan nasional progressif revolusioner untuk menegakkan Orba jang setjara konsekwen melaksanakan kemurnian Pantjasila serta UUD'45, b. untuk mentjegah terulangnja tragedi nasional akibat penjelewe- ngan dan pengchiamatan Pantjasila, c. hasrat mengamalkan semua ketetapan sidang umum ke IV MPRS dan mensukseskan Dwi Dharma dan Tjatur Karya Kabinet Ampera. mengin gat : kesimpulan sidang pleno Dewan Daerah dan konsultasi tiga organisasi tsb diatas.

Dalam menjongsong peringatan hari wafatnja Bapak Djendral Sudirman pada tgl. 29 Djanuari 1967 dengan hik- mah djiwa kepahlawanan beliau serta kesetiaan pengabdiannja terhadap negara dan rakjat Indonesia. menjatakan :

1. mendukung pernjataan bersama para menteri / Panglima ABRI pada tgl. 21 Desember 1966 dan pernyataan bersama para Panglima ABRI daerah Djateng dan DIJ pada 23 Desember 1966.
2. siap sedia mengamalkan / membantu pelaksanaan semua kete- tapan sidang umum ke IV MPRS dan mensukseskan serta Dwi Dharma serta Tjatur Karya Kabinet Ampera.
3. mengajak semua unsur dan kekuatan Orba bersatu padu memenangkan orba, mengikis habis sisa2 oknum2 /G 30 S/PKI dan orde lama ,masing2 setjara konsekwen melaksanakan kemurnian pantjasila dan UUD'45 ,membela kebenaran keadi- lan/jang hak dan menolak jang bathil menegakkan jang sah menurut hukun. 2 menegakkan
4. mengharapakan semua alat milik pemerintah pusat dan daerah dimanfaatkan untuk mengemban Ampera dan ditjegah adanya pembontjengan untuk kepentingan perseorangan atau golongan.
5. menaruh kepertjajaan sepenuhnya kepada bapak Djendral Suharto pengemnam Supersemar dan ketetapan MPRS No. IX/66 dalam mengambil tindakan tegas dan tjepat terhadap siapa pun termasuk pribadi2 warga angkatan empat lima /legiun Ve- teran IKRI/PEPABRI jang njata2 akan menjelenggarakan Pan- tjasila serta UUD'45 dan mereka jang membahayakan kesela- matan negara. Diharap bapak Djendral Suharto segera mengam- bil kebidaksanaan untuk mengachiri masa transisi menudju kemenangan Orba jang murni dengan tidak terdjadi kegontja- ngannasional dan mentjegah terulangnja tragedi nasional.

Pernjataan



U M U M :

3 - 2 - 1 67

Pernyataan tsb dibatjakan pada resepsi penutupan sidang pleno pusat Markas Besar Legiun Veteran dan di tanda tangani oleh Umar dari Angkatan '45 Sugiarto Ketua V Mada Legvetri DIJ dan Letkol Purn. Sukandar dari PEPABRI serta dikirimkan kepada seluruh pejabat / pimpinan negara lembaga2 dpusat dan daerah.

(AB/048/II/67).

---(w)---

KRT Honggowongso :
"PAMONG PRADJA DIUSAHAKAN UNTUK DJADI
BERANTAKAN DAN HAPUS OLEH P . K . I

Jogjakarta, 3 Febr. (PAB)

Krt Honggowongso , ketua panitia pertemuan . halal bihalal Korps pamong pradja monjatakan bahwa sedjak djaman dahulu kala didalam pemerintahan negara tentu terdapat golongan pamong pradja . Kemudian setelah belanda datang , dan melihat perlunya serta pentingnya pamong pradja , maka golongan ini tetap ada dandi pergunakan untuk kepentingan belanda dan diganti dengan pangreh pradja .

Karena pamong pradja ini mempunyai hubungan dan pengaruh besar dikalangan rakjat , maka didjamandjaja PKI pamong pradja ini sangat ditakuti dan dipetjah belah malahandiusahakan hapusnja sama sekali .

Tudjuan serta maksud nja tak lain mudak memasukan ideologinja kemasjarakat tanpa di halangi oleh pamong pradja .

KRT Honggo wongso mengemukakan hal ini dalam pidato pembukaannya pada pertemuan halal bihalal korps pamong pradja seluruh DIJ jang diadakan tgl. 29 Djan. 1967 dipendopo kapatihan Jogjakarta .

Pertemuan halal bihalal tsb dihadiri oleh anggota pamong pradja dari seluruh DIJ jang datang dari seluruh pendjuru daerah Jogjakarta untuk bertemu dan saling me maafkan dengan rekan2nja jang lama tidak berdjumpa . Me reka adalah keluarga pamong pradja baik jang masih aktif maupun jang sudah pensiundan tampak tokoh2 pamong pradja tertua al. KRT dipodiningrat, Sumitro Kolopaking, Purbonegoro dll .

Kata sambutan diberikan oleh ketua DPRDGR Let kol Muhardjo SH, dan Rem 072 jang dibatjakan oleh Majoor Sugito ; S.P. Pakualam jang dibatjakan oleh KRT Judaningrat .

Pertemuan tsb dimaksudkan untuk "mengumpulkan balung pisah" antara sesama keluarga korps untuk selanjutnja berada dibarisan dengan Orba .

(AB/048/II/67).

---(w)---



U M U M :

3 - 2 - '67

Ketua MPRS Djendral Nasution :

PERNJATAAN PRESIDEN TENTANG "MPRS DIKEBIRI"
HANJALAH MERUPAKAN PYSWAR BAGI MPRS

Djakarta, 3 Febr. (PAB)

Ketua MPRS Djendral Nasution dalam memberi katanggapannya tentang pernjataan Presiden Sukarno, bahwa "MPRS sekarang ini ditelikung dan dikebiri", telah menandakan bahwa, pernjataan bung Karho itu dalam logikannya sama sekali tiada logikannya, hanja merupakan pyswar (perang uraf sjaraf) bagi MPRS.

Pernjataan ketua MPRS Djendral. Nasution itu diberikan dalam mendjawab pertanjaan wartawan TVRI dalam wawantjaranja Rabu malam dalam suatu atjara jang diselenggarakan oleh TVRI jang dinamakan "Focus".

Dalam mendjawab pertanjaan TVRI itu, ketua MPRS Djendral Nasution telah memberikan pendjelasan sekitar Pelnawaksara Presiden, jang menandakan, al. bahwa, pada masa Orla Presiden selaku Pangti harus bertanggung djawab sepenuhnya thd perbuatan2nja, dan dalam pada itu, selaku Mandataris MPRS harus melak sanakan keputusan2 MPRS ke IV dengan konsekwen.

Menanggapi soal Pelnawaksara jang dimasukan dandisebut2 bahwa Menko Hankam /Kasab Djendral Nasution harus turut bertanggung djawab, Pak Nas mengaskan bahwa setjara hukum dan konstitusionil, Pak Nas tak perlu memberikan pertanggung djawabnja. Namun demikian, Pak Nas akan selalu dapat memberikan pendjelasan2 tentang itu selaku pribadi Pak Nas.

Dihadapkan setjara konstitusionil.

Semenara itu, atas pertanjaan, Pak Nas dju ga mendjelaskan bahwa, persoalan terlint atau tidaknja Presiden Sukarno dalam Gestapu/PKI, dalam sidang2 Mah milub dan Korasi sudah djelas, dan untuk itu harus diselesaikan setjara konstitusionil. Karenanja harus diadakan sidang umum MPRS ke V untuk menentukan lebih tegas tentang Presiden Sukarno tsb.

Dalam pada itu Pimpinan MPRS telah meminta kepada Komando Pemulihan Keamanan dan Djaksa Agung tentang kemungkinan2 tsb untuk dibitjarakan nanti dalam sidang MPRS. Lebih djauh, Pak Nas mengatakan pula bahwa dalam menjelesaikan persoalan ini setjara konstitusionil tidak mengurangi hak2 Demokrasi dengandjalanlain jang sesuai dengan kehendak rakjat, kalau dengan djalan konstitusionil ini tak dapat ditempuh.

Berbitjara tentang apa jang disebut "Pertanggung djawab" Menko Hankam/Kasab, pak Nas, Rembali bertanja, mengapa djustru hanja Menko Kasab sadja jang harus bertanggung djawabkannja, sebab dalam keputusan MPRS no 5 itu ditentukan tiga pokok jaitu, Gestapu/PKI; Ekonomi dan Moral.

Dalam.....



U M U M :

3 - 2 - '67

Dalam hubungan ini menurut Pak Nas, kalau memang mau dimintai pertanggung jawaban, sesuai dengan ketetapan MPRS No.5 djustru harus keseluruhannya, seperti dalam soal kemerosotan moral, hal ini tentunya harus ditanjatkan pada Menko Agama atau Menko pendidikan kebudayaan, djuga tentang kebobrokan ekonomi harus pula ditanjatkan pada Menko/Ekonomi-Kuangan.

Namun demikian, kata pak Nas selanjutnya, kesemuanya itu sebenarnya Presiden selaku Perdana Menteri, Panglima Besar Revolusi, Mandataris MPRS, Panglima Besar KOTI, Panglima Tertinggi ABRI, jg harus bertanggung djawab dan persoalan Menko2, kadang2 pelaksanaan kerjanya senantiasa dilangkahi pada masa itu, ialah Menteri2 dalam membitjarkan sesuatu persoalan jang menjangkut negara dan kepentingan rakyat seringkali dilakukan langsung dengan Presiden /Perdana Menteri, tidak melalui Menko walaupun Menkonja ada. Hal ini dapat dibuktikan tentang pengiriman misi rahasia Omar Dhani ke Peking, Menko Hankam/KASAB jang mendjadi Koordinator nja tak pernah diberitahukan. Demikian a.l. wartawan TVRI dengan Pak Nas jang dapat ditangkap oleh Wartawan PAB, Rabu malam jl.

(AB/045/07/67/II)

----(w)----

WARTAWAN PANDAI ATAU BODOH ?

Jogjakarta, 3 Febr. (PAB)

Letdjen M. Sarbini terkenal dengan serba keturus terangnya dan hal ini sesuai dengan sifat2 veteran jang selalu bitjara dengan bahasa veteran. Terus terang, bebas, tanpa pamrih djuga. Djuga dalam menghadapi wartawan pak Sarbini selalu berterus terang dengan tidak meninggalkan sifat2 kekeluargaannya. Dalam konperensi persnja di Jogjakarta pak Sarbini djuga berterus terang seperti biasanja.

Ini terdjadi waktu menjatakan bahwa apa jang akan dibawa menghadap Bung Karno adalah "top secret". Pak Sarbini selanjutnya berkata : Apa jang dijatakan rahasia sekali, sebaiknya djangan diumumkan. Tetapi wartawan kadang2 bisa berhasil mendapatkan jang rahasia itu. Entah ini karena kepandaianja atau karena kebodohanja. Tetapi sekali ini saja minta djangan tahu rahasia ini. Djangan dari saja atau dari siapapun jg hadlir dalam sidang tertutup ini. Semua ini demi kepentingan Sdr, tanah air bangsa dan negara. Djuga Kepala Negara sdr.

Demikian keterus terangan pak Sarbini jang abaknja sudah mulai chawatir kepada wartawan2 jang kadang2 ada jang tidak bisa simpan rahasia.

(AB/048/II/67).

----(w)----

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



U M U M :

3 - 2 - '67

PERSOALAN WARTAWAN "KAS ROS" SEDANG
SEDANG DALAM PENJELIDIKAN

Djakarta, 3 Febr. (PAB)

Pihak PWI Tjabang Djakarta, kini sedang mengadakan penjelidikan terhadap persoalan wartawan "KAS ROS", berhubung dengan dimuatnja berita dalam "PAB" tgl. 1 Februari 1967 jang berdjulul "Awas Wartawan Kas Ros penipu". Demikian menurut keterangan Sekretaris PWI Tjabang Djakarta J.S. Hadis kepada "PAB".

Sementara itu telah datang pula ke Redaksi "PAB" seorang wartawan bernama Kaslan Rosidi jang merasa dirinja tersangkut dalam persoalan itu, untuk memberikan pendjelasannja dan membantah pabwa dirinja penipu.

Wartawan Kaslan Rosidi mendjelaskan, bahwa dia memang mendapat order mentjetak kartu natal, tahun baru dan labaran dari "orang dalam" Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan orde ini kemudian dibawa ke pertjetakan "senopati". Diterangkan djuga, bahwa menu rut Direksi "Senopati", ongkos tjetak seluruhnja sedjumlah kl. Rp. 15.000,- tetapi Kaslan Rosidi mengaku telah bekordjasama dengan seorang pegawai pertjetakan "Senopati" sehingga berhasil membuat kwitansi sedjumlah Rp. 54.000,-

Sedangkandari pihak "orang dalam" Sri Sultan menurut penakuan Kaslan Rosidi baru diterima uang Rp. 10.000 dan uang ini telah dibajarkan kepada pertjetakan "Senopati". Kaslan Rosidi mengatakan, pula, bahwa dia tidak pernah mengaku sebagai famili Sri Sultan, dan dalam persoalan ini dia tidak pernah membawa nama wartawan, tetapi nama pribadi.

Dalam pendjelasannja kepada "PAB" Sekretaris PWI Tjabang Djakarta J.S. Hadis djuga menjatakan, bahwa kalau nanti ternjata penipuan itu benar2 dilakukan oleh Kaslan Rosidi jang kebetulan djuga sebagai anggota PWI maka pihak PWI djuga tidak akan segan2 mengambil tindakanjangan setimbapal.

(AB /045/II/67).

----(w)----





U M U M :

3 - 2 - '67

Gema dari sidang pleno Kaliurang:
VETERAN AKAN BITJARAKAN PERSOALAN DEWASA INI
SAMPAIKAN SIKAPNJA PADA BUNG KARNO.

Jogjakarta, 3 Febr. (P.A.B)

Sidang pleno pimpinan pusat Legiun Veteran Rep.Indonesia telah memutuskan untuk mengadjukan pemetjahan persoalan jang sedang hangatnja dewasa ini jang menjangkut Bung Karno sebagai Kepala Negara jg sesepuh Agung Veteran pemetjahan persoalan tsb diadjukan dengan menugaskan ketua umum Legiun Veteran dengan dibantu oleh beberapa anggauta jangdiperlukan olehKetua Umum untuk menghadap langsung kepada Bung Karno dan membitjarakan persoalan dewasa ini serta menjampikan sikap Legiun Veteran R.I .dalam menanggapi situasi dewasa ini.

Apa sisi dari pendapat tsb adalah "top secret". Demikian Letdjen Sarbini Menteri Veteran dan Demobilisasi serta ketua Umum M.B. Legvetri dalam konperensi persnja kepada para wartawan Jogjakarta digegung Jogjakarta tgl. 28 Djanuari jbl.

Hanja pengetjut jang bersembunyi.

Dalam menanggapi sutuasi dewasa ini Letdjen Sarbini menandakan bahwa hanja pengetjutlah jang d bersembunyi diatas hal2 jang gawat jang dikira tidak mampu diselesaikan. Dan ini bukan sifat serta watak veteran. Sebab bagi veteran , betapapun gawatnja serta beratnja , veteran akan mentjaba menjelesaikan segala kegawatan itu.

Dan karena itulah sidang pleno ini telah membitjarakan situasi sekarang ini dengan bahasa , dan nada serta tjara veteran.

Tentang waktunja kapan pendapat itu akan disampaikan ini hanja mengunggu timing jang tepat. Tetapi di hadapan segera mungkin dalam waktu jang tidak terlalu lama.

Dalam bidang Organisaai konperensi telah memutuskan beberapa persoalan organisasi diantaranya angkatañ Anggaran Dasar , susunan DPP dan Doktrin Veteran.

(AB/048/II/67)

---(w)---

S E L E S A I



EKU INBANG :

3-2-1967.-

PROJEK PERKAJUAN DI IRIAN BARAT AKAN
DIBANGUN

+ Kerdja sama Djepang dan Veteran R.I.

Djakarta, 3 Pebruari (PAB).-

Kamis pagi ini Menteri Veteran Dan Demobilisasi Let.Djen.M. Sarbini dengan didampingi oleh Sekretaris Djendral dan pimpinan Depved lainnya telah menerima kunjungan Tn. Morihiko Isoda dan Tn Toshisada Mori, masing2 Presiden dan Direktur dari pada Overseas Trading Co. Ltd. Tokyo Djepang, yang diantar oleh Kepala Perwakilan Legiun Veteran R.I. di Djepang Drs. Pandji Denny dan Kepala Proyek Perkajuan Veteran di Sulawesi Selatan Ibrahim Wadanatja.

Kundungan kedua pimpinan perusahaan Djepang tsb. adalah dalam rangka mengadakan research untuk mengadakan kerdja-sama dibidang pengusahaan perkajuan di Irian Barat dengan DEPVED dan Inkopad (Induk Koperasi Angkatan Darat).

Menved Letdjen M. Sarbini menjatakan kegembaraannya mengenai idee kerdja-sama tsb. dan untuk ini dapat diadjak djuga Departemen Pertanian dan Departemen Perkebunan.

Kerdja-sama ini tentu sadja harus berlandaskan ketentuan2 Pemerintah yang berlaku, misalnja U.U. Penanaman Modal Asing, Peraturan tentang Joint Enterprise dlsb.nja.

Menurut Tn. Isoda, proyek perkajuan di Irian Barat nanti akan memerlukan tenaga k.l.10 ribu orang yang diharapkan dapat dipenuhi oleh tenaga2 Veteran mengingat kurangnya tenaga di Irian Barat. Oleh Menved diinjatakan, bahwa hal itu dapat dipenuhi dan bila telah ada rentjana realisasi yang konkrit, dari pihak Veteran dapat dipersiapkan tenaga2 skilled, semi skilled dan unskilled.

Menurut rentjana, hari Dju'at besok pimpinan perusahaan Djepang tsb. akan berangkat menuju Irian Barat untuk berhubungan dengan penguasa daerah setempat untuk membitjarkan realisasi proyek kerdja-sama tsb.

+ Penjerahan 3000 Kg. Obat2an.

Dalam kunjungan ini, Presiden Overseas Trading Co. Ltd. Djepang tsb. menjerahkan kepada Menteri Veteran setjara Symbolik dua peti obat2an yang berasal dari Taisho Pharmaceutical Industry di Djepang untuk projek2 kesehatan Veteran, a.l. untuk Rehabilitasi Centrum.

Obat2.....



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

3-2-1967.-

EKU INBANG:

Obat2 jang akan diberikan s ebagai bantuan dari perusahaan tsb kepada Veteran R.I. semuanya berdjumlah 3000 kg., terdiri dari 14 djuta ampuls obat2 demam, influenza, vitamin2 dll. jang kini sedang dalam pengangkutan dengan kapal laut, jang diharapkan akan segera datang di Djakarta.

Menved Letdjen Sahrini menjatakan terima kasih jang sebesar2nja atas bantuan tsb dan mengharapkan semoga kerdja sama ini dapat menguntungkan negara dan rakjat kedua negara.

(AB/026/II/67).-

----- S1 -----

BANTUAN SELANDIA BARU DALAM RANGKA RENTJANA
COLOMBO KEPADA INDONESIA

Djakarta, 3 Pebruari (PAB).-

Seorang otorita Selandia Baru dalam bidang riset dan penelitian benih, Nj. Margot E.H. Johnston, akan berkundjung ke Djakarta pada tanggal 10-17 Pebruari 1967 jad dalam rangka suatu perdjalanan selama sepuluh minggu mengelilingi negeri2 Asia Selatan dan Tenggara.

Kundjungan tersebut, jang diselenggarakan di bawah Rentjana Kolombo, adalah untuk International Seed Testing Association serta merupakan suatu "follow up" dari International Seed Testing Training Course and Workshop untuk Asia Tenggara jang telah dilangsungkan di Selandia Baru dalam bulan Nopember 1964. Selama kundjungan beliau ke Indonesia Nj. Johnston akan mengundjungi Departemen Pertanian Lembaga Pusat Penelitian Pertanian di Bogor guna menerui para peserta dari Indonesia jang telah menghadiri konperensi tahun 1964.

(AB/043/II/67).-

----- S1 -----

Dr. Mohd. H a t t a :

SISTEM LAMA JANG BERBAU KOMUNIS TELAH MENDJADI-
KAN BEBERAPA PROJEK TERLANTAR

+ Bung Hatta kundjungi projek galangan kapal Padang.-

Padang, 3 Pebruari (PAB).-

Sistim lamajang sangat dipengaruhi oleh Komunisme, telah membuat beberapa projek terlantar atau tidak bisa dipergunakan menurut semestinja, karena beberapa peralatan.....



EKU INBANG :

3-2-1967.

peralatan dari suatu proyek di datangkan setjara ter-pentjar2 dan tersebar diberbagai daerah, demikian di-katakan oleh Dr. Mohd. Hatta.

Memberikan tjeramah di Wisma Bahari Teluk Ba-jur, dalam rangka kundjungannya ke Projek Galangan Ka-pal Padang baru2 ini, bekas Wakil Presiden RI jang per-tama itu lebih djauh mengatakan bahwa untuk Projek ga-langan kapal ini sadja, malah ada peralatan2nja jang harus diambil ke Surabaja. Dan dengan demikian tentu akan lebih memakan biaya lagi, demikian Dr. Mohd. Hatta.

Dalam kundjungannya ke Projek Galangan Kapal Padang itu, Dr. Hatta telah didampingi oleh para pembe-sar di Sum. Barat disamping kelihatan djuga ikut, Njo-nja Rahmi Hatta dan anak beliauh Farida Hatta.

Achirnja dikatakan, walau bagaimanapun sokarang kita harus menggiatkan pembangunan daerah kita, sesuai dengan kemampuan jang ada, demikian Dr. Mohd. Hatta.

(AB/039/II/67).-

----- S1 -----

HARUS LAPORKAN SEMUA ALAT2 BANGUNAN
JANG ADA

Pekanbaru, 3 Pebruari (PAB).-

Pepelrada Riau dalam suatu pengumumannja ba-ru2 ini, telah memerintahkan kepada semua pemilik2 barang2 bahan bangunan untuk mendaftarkan alat2 pembangunan jang dimilikinja kepada Pepelrada Riau, Pembantu Pepel-rada Riau dan Kepala Pemerintahan dimasing2 Daerah Kabu-paten dan Ketjaman.

Dikatakan bahwa alat2 pembangunan jang dimak-sudkan itu, adalah alat2 konstruksi untuk bangunan di-darat dan diair jang bertenaga mesin. Sedangkan bahan-2 kepunjaan Pemerintah Sipil, ABRI dan Perusahaan Negara termasuk Perusahaan Minjak Asing, djuga diharuskan untuk mendaftarkan.

Achirnja disebutkan djuga dalam pengumuman jang ditanda-tangani oleh Kol. Arifin Achmad selaku Pepelrada Riau bahwa semua pengusaha/pemilik dari alat2 tersebut, diwadjibkan untuk memberikah hak pakai setiap alat pembangunan jang diperlukan atas permintaan Guber-nur KDH Propinsi Riau/Pepelrada Riau, selaku Komandan Pelaksana Operasi Harapan didaerah Riau.

(AB/039/II/67)

----- S1 -----



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

BUKU INBANG :

3-2-1967.-

RP. 2 DJUTA HASIL IPEDA SOLOK

Solok, 3 Pebruari (PAB).-

Kepala Direktorat Ijuran Pembangunan Daerah (IPEDA) Solok Abda Januar, dalam keterangannya mengatakan bahwa menurut rentjana dalam Kabupaten Solok akan dapat dipungut Ijuran Pembangunan Daerah sebesar Rp.2 djuta.

Dikatakan bahwa dalam tahun 1966 yang lalu, dari 6 Ketjamatan dalam daerah tersebut yang telah dilakukan pemungutan, telah dapat dihasilkan Rp613.000,- u.b. Dan untuk mentjukupi target yang telah direntjanakan itu, dalam tahun 1967 ini pelaksanaan pemungutan tsb. akan dilandjutkan lagi.

Achirnja dikatakan bahwa khusus untuk IPEDA bagi tanah2 perkebunan didaerah itu, akan dilakukan operasi tersendiri, sedangkan djumlah ijuannya telah ditentukan pula, demikian Abda Januar.-

(AB/039/II/67)

----- S1 -----

SEGALA BENTUK PENJELUNDUPAN AKAN DITINDAK
TEGAS

Pekanbaru, 3 Pebruari (PAB).-

Sesuai dengan wewenang dan tugas Kedjaksanaan, dan sesuai pula dengan ketentuan2 hukum yang berlaku, pihak Kedjaksanaan akan menindak tegas segala bentuk penjelundupan, karena hal itu adalah merugikan Negara baik ditinjau dari segi Nasional maupun Internasional, demikian dikatakan oleh Djaksa Tinggi Riau, MH Sihite S.H.

Dikatakan bahwa lebih kurang 20.000 ton karet dan bahan2 export lainnya setiap bulan mengalir terus ke Singapura tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan. Sedangkan pertanggungan djawab terhadap kerugian Negara itu, baik berupa materiel maupun moril politis, tidak sadja terletak dipundak Pemerintah Pusat, tetapi erat hubungannya dengan mental-psichologis dan ripada alat2 dan petugas2 Negara didaerah, terutama didaerah Riau.

Keterangan2 diatas yang diberikan oleh Djaksa Tinggi MH Sihite SH dalam wawantjara khususnya dengan wartawan Arisan agus dari RR1 Pekanbaru, setelah Djaksa Tinggi kembali dari daerah Kepulauan Riau baru2 ini.

Diambil.....





EKU INBANG :

3-2-1967

+ Diambil tindakan tegas.-

Menurut Sibito SH, sebagai tindakan preventif dalam rangka membrantas penjelundupan untuk mentjapai stabilisasi ekonomi baru2 ini telah diadakan musjawarah segenap unsur2 Pantja Tunggal Propinsi Riau, di samping kegiatan2 dari pihak bedjaksanaan sendiri.

Dan didalam musjawarah itu, oleh pihak Kedjaksanaan telah dimintakan bantuan kepada seluruh petugas2 negara dan alat2 revolusi jang berada didaerah Riau, untuk memberikan sumbangan positif terhadap pemerintah dengan perbuatan jang konkrit dan njata, demi memenuhi Ampera.

Dan sekiranya ternjata kepadatan seorang penguasa melakukan penjelundupan, akan diambil tindakan tegas, sedangkan kepada Dept. Perdagangan jang berwenang, diharapkan pula untuk mentjabut idzin usaha pengusaha tsb, demikian Djaksa Tinggi Riau.

(AB/039/II/67).-

----- S1 -----

17% DARI TARGET DAERAH RIAU DIHASILKAN
PPN KARET

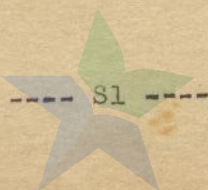
Pekanbaru, 3 Pebruari (PAB).-

17% dari target jang ditentukan untuk Daerah Riau, jang djumlahnja kurang lebih US \$1,6 djuta, telah dihasilkan oleh PPN Karet Pekanbaru dan Tandjungpinang, sebagai hasil dari export jang dilantjarkan oleh PPN Karet dlm tahun 1966 jang dikirim dengan destination Djepang, USA dan Eropa, dengan djumlah 4.500 ton, demikian bagian hubungan Masjarakat PPN Karet Pekanbaru mengabarkan.

Dikabarkan bahwa dibandingkan dengan tahun 1965, export PPN Karet dalam tahun 1966 telah naik 7 prosen, sedangkan didalam tahun 1967 ini, akan diusahakan lagi untuk meningkatkan volume exportnja.

Mengenai karet2 jang diexport oleh PPN Karet itu dikatakan baik dari Pekanbaru maupun dari Tandjungpinang, adalah hasil up-grading karet rakjat jg dilakukan oleh PPN Karet. Dalam usaha mensukseskan program kabinet Ampera dalam bidang export-drive dan up grading karet rakjat, demikian Hubungan Masjarakat PPN Karet Pekanbaru.

(AB/039/II/67)





PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

EKU INBANG :

3-2-1967.-

BAMUNAS HENDAKNJA MENUNDJUKKAN SIKAP
NJA JANG TEGAS

+ Sikap jang bebas dan aktif.

Djakarta, 3 Pebruari (PAB).-

Organisasi Pengusaha Swasta (OPS) Etjeran jang diketuai oleh Hadji T. Gusti Baleo menjadari bahwa dalam kalangan top organisasi Pengusaha Swasta Nasional telah timbul keretakan jang dapat merugikan perjuangan Pengusaha Swasta umumnja dan OPS chususnja, dengan demikian disadari pula bahwa proses tsb. terdjadi adalah bersumber semata2 kepada ketidak puasan baik terhadap struktur ataupun belied pimpinan top organisasi tsb.

Maka OPS Etjeran Gaya Baru terutama didalam daerah Djakarta-Raya dan djuga selaku anggota Bamunas dalam menilai kebidjaksanaan Bamunas akan mengambil suatu sikap jang bebas aktif dengan landasan opbouwen kritik, hendaknja Bamunas menentukan sikap tegas berdiri didalam barisan Orde baru dengan konsekwen menolak Pel.Nawaksara serta mentjela sikap dan belied pimpinan selama masa priode 1959 - 1965.

+ Pimpinan Bamunas hendaknja
akui keagalannja.

Selanjutnja Hadji T.Gusti Baleo dengan tegas menekankan hendaknja Bamunas membersihkan diri dari unsur2/antek konrev G-30-S/PKI, plin-plan dan kaum vested-interest baik ditingkat pusat maupun didaerah, serta menepatkan kepentingan anggota umumnja organisasi chususnja dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan dan mengadjak seluruh organisasi Pengusaha Swasta untuk bersama2 menilai dan mengoreksi kebidjaksanaan umum Bamunas.

Dalam hubungan ini ditandaskan pula hendaknja Pimpinan Bamunas jang ada sekarang ini dengan djiwajang besar mengakui keagalannja dan segera mengadakan musjawarah setjara demokratis guna merobah struktur organisasi dan pimpinan Bamunas dengan mengadjak/mengikut sertakan seluruh potensi organisasi Pengusaha Swasta Nasional jang berdjawa Orde Baru.

(AB/040/II/67)

----- S1 -----





EKU INBANG :

3-2-1967.-

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
TATA NIAGA KOPRA

Djakarta, 3 Pebruari (PAB).-

Menteri Perdagangan Majdjen D.Ashari dengan surat keputusannya tgl.27 Djanuari 1967 No.009/SK/I/1967, telah menetapkan tentang pelaksanaan Tata Niaga Kopra jang lengkapnja berbunji sbb.:

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN
No.009/SK/I/1967, tentang Tata Niaga Kopra.
MENTERI PERDAGANGAN,

- MENIMBANG : a) Bahwa dalam rangka usaha Rehabilitasi dan Stabilisasi Ekonomi chususnja untuk melaksanakn Keputusan2/Instruksi2 dan Ketentuan2 dari Presidium Kabinet Ampera tanggal 3 Oktober 1966 dalam bidang Ekonomi dan Keuangan, dianggap perlu mentjabut kembali surat2 keputusan Menteri Perdagangan No. 064/SK/VI/1966 tanggal 30 Djuni 1966 tentang Tata Niaga Kopra dan No.07/SK/VII/1966 tanggal 16 Djuli 1966 tentang Alokasi Perdagangan Kopra Lokal, Antar pulau Kepulauan Djawa dan Ekspor per-Daerah.
- b) Bahwa sebagai pengganti peraturan Peraturan jang lama tersebut, perlu ditetapkan peraturan baru tentang pelaksanaan Tata Niaga Kopra.

- MENGINGAT: 1. Surat keputusan Perdana Menteri No.44/PM/1966 tanggal 7 Djuni 1966 tentang Pembekuan Kegiatan BUKOPRA.
2. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.141/M/SK/1962 tanggal 4 Agustus 1962 tentang pengangkutan barang2 dalam pengawasan keluar negeri.
3. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.142/M/SK/1962 tanggal 4 Agustus 1962 tentang pengangkutan barang2 dalam pengawasan dalam Daerah Pabean Indonesia.
4. Keputusan2/Instruksi2 Presidium Kabinet AMPERA tanggal 3 Oktober 1966 dalam bidang Rehabilitasi dan stabilisasi Ekonomi dan Keuangan.

MEMUTUSKAN :

Dengan mentjabut kembali surat2 Keputusan Menteri Perdagangan No.064/SK/VI/1966 tanggal 30 Djuni 1966 tentang Tata Niaga Kopra, dan No. 076/SK/VII/1966 tanggal 16 Djuli 1966 tentang Alokasi Perdagangan Lokal, Antara pulau kepulauan Djawa dan Ekspor per Daerah.

MENETAPKAN.....



3-2-1967.-

EKU INBANG:

MENETAPKAN: Keputusan Menteri Perdagangan tentang "Pelaksanaan Tata Niaga Kopra" sebagai berikut.

Pasal 1

Jang dimaksud dengan kopra dalam keputusan ini ialah daging, buah kelapa jang dikeringkan termasuk jang akan dan sedang dikeringkan.

Pasal 2

Tata Niaga Kopra sebagai bahan pokok kebutuhan rakyat dan sumber penghasil devisa, dalam batas2 tertentu perlu diatur dan diawasi Pemerintah.

Pasal 3

1. Bagi daerah2 dimana telah ada Koperasi Primer Kopra pengumpulan kopra dilakukan oleh Koperasi tersebut sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya.
2. Di daerah2 dimana Koperasi Primer belum sanggup atau belum ada untuk melaksanakan tugas pengumpulannya, maka baik eksportir maupun pedagang antar pulau jang telah ditetapkan diperkenankan untuk membeli kopra langsung dari petani kelapa.
3. Pembelian/pengumpulan kopra sebagaimana tsb. dalam ayat 2 pasal ini harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan setempat.

Pasal 4

1. Perdagangan antar pulau kopra dapat dilakukan oleh semua pedagang antar pulau jang telah mendapat pengakuan sebagai pedagang Antar pulau (PAP) dari Departemen Perdagangan atau perwakilan didaerah tersebut.
2. Ekspor kopra dapat dilakukan oleh semua eksportir nasional jang mempunyai angka Pengenal Ekspor (A.P.E.) dan bonafide dan ditunjukkan langsung kepada pembeli2 dinegara2 konsumen.
3. Pedagang antar pulau maupun eksportir kopra jang dapat diikuti sertakan dalam tata niaga kopra ini diharuskan berdomosil dan/atau mempunyai perwakilan didaerah produksi kopra.

Pasal 5

1. Setjara periodik oleh Menteri Perdagangan atau pejabat jang ditunjuk olehnya ditetapkan antara jumlah kopra jang dibutuhkan lokal, antar.....

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...
...
...



3-2-1967.-

- antar pulau kepulauan Djawa dan ekspor, berdasarkan atas usul dari Gubernur/Kepala Daerah bersama2 dengan Perwakilan Departemen Perdagangan setempat.
2. Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan setempat mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Membagikan djatah kopra tersebut pada ayat 1 Pasal ini kepada eksportir, pedagang antar pulau dan pabrik2 minjak kelapa lokal;
 - b. Mendjamin serta mengamankan bahwa para petani kelapa dalam pendjualan kopranja menerima serendah2nja 60% (enampuluh persen) dari tiap barga pendjualan af-gudang pelabuhan dan mengumumkannya setjara umum dan berkala;
 - c. Mengatur serta mengawasi pelaksanaan ekspor kopral dengan memperhatikan wewenang, tugas dan tanggung-djawab instansi2 jang berdiri dari Direktorat Ekspor, Direktorat BBA & Tjukai, Departemen Maritim dan Pengasahan labuhan, dan Biro Lalu lintas Devisa didaerah setempat.
 3. Untuk mendjamin pemasukan kopra kepulauan Djawa, Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan setempat diharuskan memberikan prioritas utama serta mendjamin kopra jang akan diantar-pulaukan sesuai dengan target jang akan ditetapkan.

Pasal 6

Pungutan daerah produksi atas kopra diatur sebagai berikut :

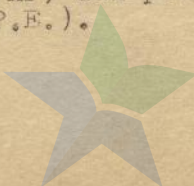
1. Untuk maksud pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Tingkat I diberikan kesempatan mengadakan pemungutan untuk pembangunan daerahnja atas kopra dengan ketentuan bahwa pungutan tersebut hanja dibenarkan setinggi2nja 10% (sepuluh persen) dari harga kopra af-gudang

Pemerintah daerah Tingkat I mengadakan pembagian hasil pungutan tersebut guna pembangunan daerah didalam wilajahnja.

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenakan tindakan administratif, termasuk pentjabutan pengakuan sebagai pedagang Antar Pulau (PAP) dan pentjabutan Angka Pengenal Ekonomi (A.P.E.).

Pasal 8....





EKU INBANG :

3-2-1967.-

Pasal 8

Pelaksanaan Keputusan ini diatur selandjutnja oleh Direktur Djendral Urusan Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 9

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

(AB/050/II/67).-

----- S1 -----

17.229 DJIWA DITRANSMIGRASIKAN KE PER-
KEBUNAN DILUAR DJAWA DALAM TAHUN 66

Djakarta, 3-Februari (PAB).-

Umumnja perkebunan2 diluar Djawa menghadapi masalah jang sama, jaitu kekurangan tenaga kekarywan/manpower. Dalam hal ini PTK-PPN mengusahakan agar kebutuhan perkebunan terhadap manpower dapat ditjukupi. Tahun 1966 djumlah transmigrasi karyawan adalah 9.558 orang jang bersama2 dengan keluarganja berdjumlah 17.229 djiwa. Umumnja tenaga karyawan diambil dari daerah2 padat di Djawa Tengah dan Djawa Timur. Dalam keadaan gawat jang disebabkan oleh bentjana2 alam seperti Gunung Agung di Bali, bandjir Sala dan Gunung Kelud, PTK - PPN memberi bantuannja dengan mendahulukan pengiriman orang2 jang ditimpa malapetaka.

Sedjak tahun 1962 s/d 1966 PTK - PPN telah mengirimkan sebanjak 52.382 tenaga karyawan atau 100.801 djiwa (tenaga karyawan dan keluarga). keberbagai perkebunan negara maupun swasta di Atjeh, Sumatra Utara, dan Riau dan Kalimantan.

(AB/R09/II/67).-

----- S1 -----





EKU INBANG :

3-2-1967.

KEMUNGKINAN KEMEROSOTAN DEvisa HASIL
KARET 1967

+ 1966 devisa export karet +
49 djuta U.S. \$

Djakarta, 3 Pebruari (PAB).-

Prestasi produksi karet dalam tahun 1966 jg. lalu mentjapai prestasi peningkatan sebesar $1\frac{1}{2}\%$ dari seluruh perkebunan PPN Karet I s/d XVI, demikian diterangkan oleh Direksi BPU-PPN Karet kemarin siang di Djakarta.

Dikatakan bahwa peningkatan ini dianggap baik, karena mengingat susunan umur tanaman, dimana tanaman tua (diatas 25 tahun) meliputi 49% atau 97.000 ha. areal dari 200.000 ha jang ada.

Dengan susunan umur pohon seperti diatas, maka produksi PPN I -XVI sampai dengan tahun 1970 hanya baru disekitar 100.000 ton setiap tahun, dan dengan adanya peremadjaan jang dapat dilakukan baru pada sesudah tahun 1970 produksi dapat ditingkatkan, dimana baru pada tahun 1975 bilamana usaha peremadjaan dapat berdjalan sebagaimana mestinja seperti tersedianja biaya2 khusus untuk itu, produksi dapat mentjapai 150.000 ton per tahun.

Dikemukakan selandjutnja, bahwa dari angka2 export jang dilakukan oleh BPU-PPN Karet dalam tahun 1966, telah diperoleh devisa sedjumlah US \$ 49.307.993,- jang terdiri dari karet kering/latex, ex perusahaan PPN Karet I-XVI, PPN Karet XVII/XVIII dan Karet Rakjat dari Riau.

+ Devisa turun?

Selandjutnja diterangkan bahwa dalam tahun 1967 ini, BPU-PPN karet akan dapat mempertahankan produksi nja akan tetapi belum tentu akan dapat mentjapai djumlah devisa seperti tahun 1966. Hal ini dikemukakan mengingat akan kemungkinan merosotnja harga karet di pasaran dunia, seperti apa jang telah terbukti awal tahun ini. Seperti diketahui bahwa harga karet dunia awal tahun ini telah turun 2 sen dari harga dalam tahun 1966. (harga tahun 1966 22 sen \$/pond, saat ini 20 sen \$/pond) dan kemungkinan akan merosotnja lagi harga pasaran dunia masih ada. Demikian diterangkan.

(AB/R09/II/67).

SI

REKAM JEKAL

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945

1945



EKU INBANG :

3-2-1967.-

SEKALI LAGI PENJELASAN PT,PP.
BERDIKARI

+ Harap "GASBIINDO" bisa mengerti.

Djakarta, 3 Pebruari (PAB).-

Menganggapi berita dalam surat kabar "Pelopor Baru" jang terbit pada hari Selasa tgl. 31 Djanuari 67 jang berdjul : "PERLAKUAN TIDAK ADIL TERHADAP 300 PEGAWAI EX PT KARKAM" berita mana dikutip dari berita "Antara" sebagai hasil wawantjara antara Pers dengan PB. Gasbiindo maka pihak PT,PP. Berdikari mendjelaskan sbb.: 1. Gasbiindo baik setjara lisan maupun tertulis telah diberi pendjelasan jang se-luas2nja mengenai status PT PP Berdikari dan status Pegawai2 Ex. PT, PP Karkam, PT Aslam dan PT Sinar Pagi.

2. Gasbiindo telah melaporkan persoalan ini kepada Kementerian Tenaga Kerdja. Dalam hubungan ini Kem. Tenaga Kerdja telah mendengar pendjelasan2 dari Let. Kol. Ismail SH. selaku utusan dari PT, PP Berdikari mengenai persoalan2 jang diadjukan oleh Gasbiindo pada Kementerian tersebut dan pihak Kementerian sesudah melihat bukti2 jang diadjukan oleh Letkol Ismail SH berpendapat bahwa tuduhan2 dari Gasbiindo itu adalah tidak benar.

3. Gasbiindo mungkin memang tidak mengerti atau tidak menguasai persoalannya meskipun sudah ber-ulang2 dibetahkan, ataupun tidak mengerti sehingga berita2 jang dilantjarkan dalam surat2 kabar itu hanja dengan maksud membikin keruh suasana, karena ternyata tuduhan2 yang baik jang dilantjarkan di surat2 kabar maupun diadjukan kepada Kem. Tenaga Kerdja itu tidak berdasarkan bukti2, akan tetapi hanja berdasarkan sentimen dan rabaan se-mata2.

4. Untuk itu, maka Letkol. Ismail SH. selaku pedjabat PT PP Berdikari jang diberi wewenang memberikan pendjelasan2 mengenai status PT PP Berdikari dan status Pegawai2 Ex. PT Karkam, Aslam, Sinar Pagi menganggap perlu sekali lagi memberikan pendjelasan sebagai berikut:

Pengawasan terhadap PT Aslam dan PT Karkam adalah berbentuk sebuah team jang diberi nama "Team Pengawas Management PT Aslam dan PT Karkam jang bertugas mengadakan pengawasan, pengamanan, penguasaan dan pengolahan PT Aslam dan PT Karkam atas semua harta kekayaan baik jang bergerak, maupun jang tidak bergerak beserta alat2 li- quide, surat berharga dll milik pemilik Perusahaan2 tersebut.

Team Pengawas Management adalah Badan Pekerdja dan bukan Badan Hukum dengan tugas2 tertentu dan langsung bertanggung djawab kepada Wakil Perdana Menteri bidang Ekono mi, Keuangan dan Pembangunan dan Wakil Perdana Menteri Bidang Keamanan dan Pertahanan a.i. dan dalam tugas jang

diberikan.....

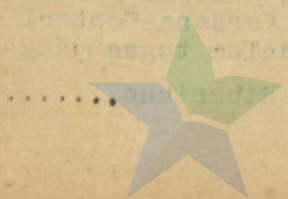
1957-58

RESEARCH REPORT

"SARAWAK" + "MALAY" + "INDONESIA" ...

1957-58

The following text is a mirrored bleed-through from the reverse side of the page. It appears to be a report or document with several paragraphs of text, though the content is illegible due to the mirroring and fading. The text is oriented upside down relative to the page's original orientation.



EKU INBANG :

diberikan kepada Team Pengawas Management tidak terdapat soal2 jang berhubungan dengan penampungan dan pembinaan personil PT Aslam dan PT Karkam, namun demikian demi untuk kelanjutan tugasnja untuk sementara masih merasa perlu mempergunakan personil tersebut disamping tenaga2 anggota2 Team sendiri.

Dengan terbentuknja Perusahaan (PT) sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Keputusan Presidium Kabinet RI No.01/EK/KeP/8/1966 tanggal 12 Agustus 1966 maka Team Pengawas Management dibubarkan, sehingga segala kegiatan usahanja beserta akibat2 hukumnja ditampung oleh Perusahaan (PT) jang baru terbentuk dan seluruh harta kekajaan dari ex PT Aslam dan PT Karkam dan PT Sinar Pagi jang terdaftar pada tanggal 10 Agustus 1966 diberikan sebagai modal pindjaman pada Perusahaan (PT) jang baru terbentuk itu.

Karena PT Aslam, PT Karkam dan PT Sinar pagi masih tetap berdiri sebagai PT, maka dengan bubarnya Team Pengawas Management tersebut, personil PT Aslam PT Karkam dan PT Sinar Pagi kembali kepada status semula sebagai personil PT2 tersebut. Sedangkan seluruh anggota Team Pengawas Management dinjatakan bubar dan diserahkan kepada kehendak mereka sendiri untuk masuk kedalam formasi Perusahaan (PT) jang baru terbentuk.

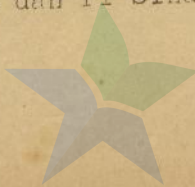
Lain daripada Team Pengawas Management jang ber status Badan Pekerdja jang selandjutnja segala kegiatan usaha ex PT Aslam, PT Karkam dan PT Sinar Pagi, maka PT PP Berdikari sebagai Badan Hukum jang baru terbentuk menurut pasal 1 Keputusan Presidium Kabinet RI no.01/EK/KEP/8/1966 adalah badan hukum jang berdiri sendiri dengan modal sendiri, dan bukan badan hukum jang melanjutkan kegiatan usaha dari siapapun djuga.

Kemudian setelah PT PP Berdikari terbentuk dengan modal sendiri, maka kepadanya oleh Ketua Presidium Kabinet diberikan modal pindjaman sesuai dengan ketentuan dalam ps.4 Keputusan Presidium Kabinet RI no.01/EK/KEP/8/66 tgl.12 Agustus 1966. Djadi sifatnja adalah pindjam memindjam modal dan bukan melandjutkan usaha. Karena dengan bubarnya Team Pengawas Management masih belum ada pertanggungangan djawab mengenai tugas jang diberikan kepadanya, maka oleh Ketua Presidium Kabinet RI dirasa perlu adanya Badan jang harus menampung segala usahanja beserta akibat2 hukumnja. Dalam hal ini ditunjuk PT PP Berdikari.

+ Penggunaan tenaga berdasarkan efisiensi kerdja.

Sebagai Badan Hukum jang baru terbentuk, maka PT PP Berdikari bebas memilih personilnja sesuai dengan pertimbangan efisiensi kerdja dan mengenai personil ex PT Aslam, PT Karkam dan PT Sinar Pagi tidak disebut2

dalam.....





3-2-1967.

EKU INBANG :

dalam keputusan Presidium Kabinet RI No.01/EK/KEP/8/66 tanggal 12 Agustus 1966. Hal ini dapat dimengerti karena personil dari PT-2 yang masih berdiri (PT Aslam, PT. Karkam dan PT Sinar Pagi) belum bubar, tetap dalam keadaan status semula. Walaupun demikian mereka oleh PT PP. Berdikari ditampung (bukan dipekerdjakan) sebagai personil PT Aslam, PT Karkam dan PT Sinar Pagi yang masih aktif dengan jaminan penuh sesuai Surat Keputusan Direksi No.013/A/Kpts/1966 tanggal 14 September 1966 sampai ada penyelesaian yang positif tentang status PT Aslam, PT Karkam dan PT Sinar Pagi dikemudian hari.

Adalah tidak benar sama sekali bahwa PT PP Berdikari menerima pegawai hanya dari suatu golongan/organisasi tertentu saja atau atas dasar pilih kasih, tetapi berdasarkan kepada efisiensi kerdja dan tidak benar bahwa pegawai2 PT PP Berdikari kebanyakan adalah berasal dari PN Tjipta Niaga.

(AB/03/II/67).-

----- Sl -----

S E L E S A I



3-2-1967.

INSTITUTE PEMBERINTAHAN DALAM
NEGERI AKAN DIBUKA DI JOGJAKARTA.-

Jogjakarta, 3 Pebruari (PAB).-

Dalam tahun ini, di Jogjakarta akan dibuka sebuah pendidikan baru ialah institute Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri. Dengan akan dibukanya Institute tsb. dalam tahun ini akan ada 2 Institute ialah di Malang dan Jogjakarta. Seperti diketahui APDN Malang kini sudah ditingkatkan menjadi Institute dan pembukaannya tinggal menunggu waktu saja karena segala persiapan sudah matang.

Hal ini diterangkan oleh Sudarjadi BA, pegawai tugas belajar dari Kementerian Dalam Negeri di UGM pada suatu konferensi pers di Jogjakarta baru2 ini. Selanjutnya dijelaskan oleh Sudarjadi BA bahwa menurut rentjana di Indonesia harus ada 5 Institute sematjam itu karena direntjanakan di tiap Dati II harus ada 2 sardjana ilmu pemerintahan dalam negeri.

----- S1 -----

TARUNA AKABRI " KIRAP " DI JOGJAKARTA

Jogjakarta, 3 Pebruari (PAB).-

Tanggal 30 Djanuari 1967 pagi j.l., para taruna AKABRI yang baru kemarin diresmikan oleh Djendral Soeharto mengadakan upatjara "Kirap" dibekas ibukota revolusi Jogjakarta. Kirap ini dimaksudkan untuk memperkenalkan para taruna Akabri tsb kepada masyarakat dan langsung minta doarestu masyarakat Indonesia yang diwakili oleh masyarakat Jogjakarta agar dalam menempuh pendidikan untuk menjadi tjalon perwira ABRI yang baik bisa berhasil. Kirap para taruna ini mendapat perhatian yang besar sekali dari masyarakat Jogjakarta baik tua maupun muda, terutama para muda-mudinya. Kirap yang merupakan defile yang dimulai dari lapangan Kridosono ini diterima oleh para pedjabat didepan gedung Jogjakarta dan berakhir dialun2 utara Jogjakarta.

----- S1 -----



Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, which is mostly illegible due to fading and bleed-through.



3-2-1967.

"MALAM SETIA KAWAN WARTAWAN PWI DJAJA"

Djakarta, 3 Pebruari (PAB).--

Dalam rangka membantu perongkosan pengobatan dua orang wartawan anggauta PWI jang kini sedang menderit sakit keras dan harus berobat di luar negeri, masing2 sdr.Drs. Asnawi Idris dan Zaenal Zakse, maka Seksi film dan Teater PWI Djaja dalam pertemuannya tgl.31 Djanuari jbl telah mengambil keputusan untuk menjelenggarakan "Malam Setia Kawan Wartawan" jang di rentjanakan akan diadakan pada awal bulan Maret jad.bertempat di Istora Senajan Djakarta.

Pada malam tsb. akan disadjikan film terbaru produksi PIP Djakarta jaitu "Dibalik Tjahaja Gemerlapan" dengan diperkuat oleh barisan artis2 biduan2 tenar Ibukota dibawah iringan band Mus Muallim dan band2 tenar lainnja.

Dalam pertemuan tsb. telah pula dibentuk suatu panitia malam Setia Kawan Wartawan jang terdiri dari Ketua Chaidir Rachman, Wkl. Ketua Sjamsul Fuat, Sekretaris M.L. Geasill, Wk. Sekretaris Sofjan Lubis, Bendahara Amiruddin, Sie Publikasi Sandy Tyas, Djailani Sitohang, Benny Yahja, Sie Transport Hasan Basri, Bag. Sales Chaidir Rachman, S.M. Ardan dan H. Misbach Jusa Biran, Sie Protokol/Keamanan Junus Djunaidi dan Sjah Sjafid Rachim, Sie Peridjinan/Fasilitas Amiruddin dan Jusuf, Sie Konsumsi M. Nuch Muksin Nourly Ria Nasution, Sie Penghubung Erlanda Rai Rs. Jusuf dan Ramli Hasan.

Dapat ditambahkan bahwa kedua anggauta PWI tsb. adalah drs. Asnawi Idris dari harian Djaja jang harus berobat di Tokyo dan Zaenal Zakse wartawan harian KAMI jang harus berobat di negeri Belanda.

(AB/045/II/67).

---- Sl ----

PIP DISTRIBUTOR TERBENTUK

Djakarta, 3 Pebruari (PAB).--

Setelah persari, Ifdil, dan Perfini bergabung dalam memproduksi film, maka ketiga perusahaan film ini kini telah mengikat gabungan pula dalam hal distribusi filmnja.

Baik film Persari, Ifdil maupun Perfini, kini banja akan diedarkan oleh distributor gabungan ini. Sebelumnja gabungan dalam bidang distribusi ini banja antara Persari dan Perfini sadja dengan trademark: PP film distributor maka kini trade mark itu telah djadi PIP film distributor. Direktur dari Distributor gabungan tersebut berada ditangan H. Ridwan Nasution.

(AB/050/II/67).

---- Sl ----



3-2-1967

RACHMAT SUDAH SEHAT

Djakarta, 3 Pebruari (PAB).-

Seperti pernah diberitakan bahwa Rachmat Kartolo jang baru menjelesaikan film "Dibalik Tjahaja Gemerlapan" itu telah mengalami operasi di Makao. Seminggu sebelum Lebaran, bintang penjanji dan lajar putih jang lagi menikmati "Honey Moon" itu kembali dapat serangan sakit perutnja jang sudah chronis itu. Waktu dalam pembuatan produksi PIP "D.T.G."pun Rachmat sempat tergeletak beberapa hari karena serangan tersebut. Tapi serangannya ini kali tidak ajal lagi langsung "ditjiduk" biang penjanjinja "Gestapu" didalam perut Rachmat itu tak lain adalah usus buntunja.

Operasi jang agak besar itu dichawatirkan akan memakan waktu untuk beristirahat bagi Rachmat, sedang sebuah produksi tengah menanti di Djakarta. Tapi berkat do'a dan badannya jang memang sehat itu kini ia sudah nampak kelujuran lagi dan sehat seperti biasa meskipun masih tetap mendjalankan "diet". Dan dalam pertengahan Pebruari ini sudah akan serta membintangi produksi PIP jg. terbaru.

(AB/050/II/67).-

----- S1 -----

SUKARNO M NOOR DIPUDJI DJAMALUDDIN MALIK

Djakarta, 3 Pebruari (PAB).-

Produser film jang kini lebih giat dibidang politik, M.Djamaluddin Malik, sangat mengagumi permainan Sukarno M.Noor dalam film "Dibalik Tjahaja Gemerlapan". Bintang panggung dan lajar putih jang lebih suka disebut "aktor" ini telah agak lama tak muntjul setjara serius dilajar putih. Dipanggunpun baru beberapa bulan jang lalu ketangguhannya sebagai "Caligula". Dan tidak disangka2 didalam film musical Sukarno M.Noor telah sempat memperlihatkan mutu2 permainan jang sedap. Pak Djamal sampai ter-pingkel2 dalam mengagumi permainan aktor tangguh ini. Karena jang diperankannya adalah tokoh produser penipu.

Aktor Sukarno M. Noor pernah ikut membintangi film2 Persari dimasa lalu, dan bintang utama dari film jang dapat badih dalam "Pesta Film Indonesia" ke VI (1959). Tapi menurut Pak Djamal dalam film "Dibalik Tjahaja Gemerlapan" ini permainan Sukarno M.Noor memperlihatkan kemadjuan2 jang luar biasa, beliau rasa disinilah permainannya jang terbaik selama ini.

(AB/050/II/67).-

----- S1 -----



PENDIDIKAN/KEBUDAJAAN :

3-2-1967.

ANIMO UNTUK DJADI GURU TAMBAH BERKURANG

+ Murid2 SPG Pekanbaru kian menjusut.

Pekanbaru, 3 Pebruari (PAB).-

Animo murid2 tamatan SLP di Pekanbaru, sangat sedikit sekali untuk mau meneruskan peladjarannya pada SPG (d/h SGA), demikian wartawan PAB memperoleh keterangan dari para pendidik di Pekanbaru.

Dikatakan bahwa setelah diselidiki, ternyata murid2 tamatan SLP itu merasa takut sekiranya mereka melandjutkan peladjarannya ke S.P.G., mereka tidak akan dapat lagi menjambung kesekolah2 jang lebih tinggi, andainja mereka tamat nanti. Karena menurut anggapan orang tua murid2 itu, tamatan SPG tidak dapat melandjutkan peladjarannya ke Universitas2 atau Perguruan2 Tinggi lainnja.

Selain daripada itu, keengganan ini djuga di sebabkan tamatan SPG sekarang ini, hanja bisa mengadjar pada Sekolah Dasar. Sedangkan sebelum SGB dihapuskan, tamatan2 SPG (SGA) bisa mengadjar di Sekolah2 Landjutan Pertama.

+ Hanja + 25 orang jang melamar.-

Untuk tahun adjaran 1967 ini, pada SPG Negeri Pekanbaru, hanja melamar kurang lebih 25 orang tamatan2 SLP. Hingga dengan demikian, murid2 SPG Negeri Pekanbaru kian menjusut, karena siswa2 jang telah menamatkan peladjarannya ditahun jang lalu lebih banjak dari pada jang mau masuk sekarang.

Dengan bertambah kurangnya animo peladjar2 untuk menjambung peladjarannya ke SPG ini, jang merupakan satu2nja sekolah Pemerintah jang akan mentjetak guru2 untuk sekolah Dasar, masalah kekurangan guru2 SD di Riau, tetap tidak akan dapat dipetjahkan sendiri oleh Daerah itu.

Karena kebutuhan2 akan guru2 SD tiap tahun makin bertambah, sedangkan tjalon2 jang dihasilkan makin berkurang, demikian wartawan PAB melaporkan dari Pekanbaru.

(AB/039/II/67)

----- S1 -----



PENDIDIKAN/KEBUDAJAAN:

3-2-1967.

KONPERENSI PENDIDIKAN AGAMA

Padang, 3 Februari (PAB).-

Di Padang saat ini tengah berlangsung Konperensi Dinas Insp. Pendidikan Agama Sumbar, yang dihadiri oleh Kepala2 Ipake, Ipadu, Penilik Pendidikan agama dan Kepala2 PGA.

Dalam konperensi dinas itu, terutama akan dibahas se kitar usaha akan harus adanya sebuah PGA 6 tahun di tiap2 Kabupaten dan sekaligus usaha memperbanyak PGA 4 tahun.

(AB/039/II/67).-

----- SI -----

SELESAI.

